

# STATISTIK PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA BARAT**

# STATISTIK PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT 2018



# **STATISIK PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018**

ISBN : 978-602-5745-28-7  
Katalog : 3303002.32  
No. Publikasi : 32520.1909

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm  
Jumlah Halaman : xii + 47 halaman

## **Naskah:**

Bidang Statistik Sosial

## **Penyunting:**

Bidang Statistik Sosial

## **Gambar Kulit:**

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

## **Ilustrasi Foto:**

freepik.com, Jawa Barat

## **Diterbitkan oleh:**

©Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

## **Dicetak oleh:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.*

## **STATISIK PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018**

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab Umum: Ir. Dody Herlando, M.Econ

Penanggung Jawab Teknis: Ir. R. Gandari Adianti Aju Fatimah, M.Si

Penulis dan Pengolah Data: Partinah, S.A.P.

Gambar Kulit : Vira Wayuningrum, S.ST, M.Stat

Penyunting / Editor : 1. Judiharto Trisnadi, SST MM

2. Renie Wulandari, S.ST

<https://jabar.bps.go.id>



## KATA PENGANTAR

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia, selain kebutuhan pangan dan sandang. Kesejahteraan masyarakat tercermin dari layaknya kondisi perumahan yang ditempati. BPS Provinsi Jawa Barat berupaya menyajikan data terkait perumahan salah satunya melalui publikasi "Statistik Perumahan di Jawa Barat Tahun 2018".

Publikasi ini berisi data dan informasi mengenai karakteristik perumahan di Jawa Barat. Data dan informasi yang tersaji pada publikasi ini untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan hasil penghitungan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018.

Diharapkan publikasi ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya pemenuhan kebutuhan evaluasi program pembangunan perumahan di Jawa Barat.

Bandung, September 2019  
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat,



**Dody Herlando**

<https://jabar.bps.go.id>

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN TABEL .....	x
BAB. 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Penulisan .....	2
1.3. Sumber Data .....	2
1.4. Sistematika Penulisan .....	2
1.5. Konsep dan Definisi .....	3
Bab 2. KARAKTERISTIK PERUMAHAN JAWA BARAT .....	9
2.1. Penguasaan Tempat Tinggal .....	9
2.2. Status Kepemilikan .....	11
2.3. Rata-Rata Luas Lantai Per Kapita .....	13
2.4. Jenis Lantai Terluas .....	15
2.5. Jenis Atap Terluas .....	16
2.6. Jenis Dinding Terluas .....	18
2.7. Fasilitas Air Minum .....	20
2.7.1. Sumber Air Minum .....	20
2.7.2. Jarak Sumber Air Minum dengan Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat .....	22
2.7.3. Air Minum Layak .....	23
2.8. Sumber Penerangan Utama .....	24
2.9. Sanitasi Rumah Tangga .....	25
2.9.1. Fasilitas Tempat Buang Air Besar .....	26
2.9.2. Jenis Kloset yang Digunakan .....	27
2.9.3. Tempat Pembuangan Akhir Tinja .....	28
2.9.4. Waktu Pembuatan Tangki Septik .....	30
2.9.5. Sanitasi Layak .....	32
2.9.6. Bahan Bakar Untuk Memasak .....	33
Daftar Pustaka .....	35
Lampiran .....	40

<https://jabar.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Status Wilayah dan Penguasaan Bangunan di Jawa Barat, Tahun 2018 .....	10
Gambar 2. Peta Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Penguasaan Bangunan Dengan Status Milik Sendiri di Jawa Barat, Tahun 2018 .....	10
Gambar 3. Persentase Rumah Tangga dirinci Menurut Status Kepemilikan Lahan di Jawa Barat, Tahun 2018 .....	11
Gambar 4. Peta Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Penguasaan Bangunan di Jawa Barat, Tahun 2018 ....	12
Gambar 5. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Status Wilayah dan Luas Perkapita Bangunan Tempat Tinggal di Jawa Barat, 2018 .....	14
Gambar 6. Peta Sebaran Persentase Rumah Tangga dengan Luas Perkapita Bangunan Tempat Tinggal diatas 8 m2 di Jawa Barat, 2018 .....	14
Gambar 7. Persentase Rumah Tangga dirinci Menurut Jenis Lantai Terluas di Jawa Barat, Tahun 2018 .....	15
Gambar 8. Peta Sebaran Persentase Rumah Tangga Dengan Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal Berupa Marmer/Keramik di Jawa Barat, Tahun 2018 .....	16
Gambar 9. Persentase Rumah Tangga dirinci Menurut Wilayah dan Jenis Atap Terluas di Jawa Barat, Tahun 2018 .....	17
Gambar 10. Peta Sebaran Persentase Rumah Tangga Dengan Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal Berupa Beton/Genteng di Jawa Barat, Tahun 2018 .....	18
Gambar 11. Persentase Rumah Tangga dirinci Menurut Wilayah dan Jenis Dinding Terluas di Jawa Barat, Tahun 2018 .....	18
Gambar 12. Peta Sebaran Persentase Rumah Tangga Dengan Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal Berupa Tembok di Jawa Barat, Tahun 2018 .....	19
Gambar 13. Persentase Rumah Tangga dirinci Menurut Sumber Air Minum Utama di Jawa Barat, Tahun 2018 .....	21
Gambar 14. Peta Sebaran Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Utama Berupa Air Kemasan/Air Isi Ulang di Jawa Barat, Tahun 2018 .....	21

Gambar 15.	Persentase Rumah Tangga dirinci Menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat penampungan limbah/kotoran/ tinja terdekat di Jawa Barat, Tahun 2018 .....	22
Gambar 16.	Perkembangan Persentase Rumah Tangga Yang Mengonsumsi Air Minum Layak di Jawa Barat, Tahun 2014-2018 .....	23
Gambar 17.	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN (meteran) di Jawa Barat, Tahun 2018 .....	24
Gambar 18.	Peta Sebaran Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Utama Berupa Listrik PLN Dengan Meteran di Jawa Barat, Tahun 2018 .....	25
Gambar 19.	Persentase Rumah Tangga dengan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Jawa Barat, Tahun 2018 ....	26
Gambar 20.	Peta Sebaran Persentase Rumah Tangga dengan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Jawa Barat, Tahun 2018 .....	27
Gambar 21.	Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Jenis Kloset Yang Digunakan di Jawa Barat, Tahun 2018 .....	28
Gambar 22.	Persentase Rumah Tangga Dirinci Tempat Pembuangan akhir tinja di Jawa Barat, Tahun 2018 .....	29
Gambar 23.	Peta Sebaran Persentase Rumah Tangga dengan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Berupa Tangki Septik/IPAL di Jawa Barat Tahun 2018 .....	30
Gambar 24.	Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Sudah Berapa Lama Tangki Septik Dibuat di Jawa Barat, Tahun 2018 .....	31
Gambar 25.	Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Status Wilayah dan Frekuensi Pengosongan/Penyedotan Tangki Septik Dalam 5 Tahun Terakhir di Jawa Barat, Tahun 2018 .....	31
Gambar 26.	Perkembangan Persentase Rumah Tangga Dengan Fasilitas Sanitasi Layak di Jawa Barat, Tahun 2014-2018	32
Gambar 27.	Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Status Wilayah dan Bahan Bakar Utama Untuk Memasak di Jawa Barat, Tahun 2018 .....	33

## DAFTAR LAMPIRAN TABEL

	Halaman
Tabel 1. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Jawa Barat, 2018 .....	38
Tabel 2. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Jawa Barat, 2018 .....	39
Tabel 3. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Luas Perkapita di Jawa Barat, 2018 .....	40
Tabel 4. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Jenis Lantai Terluas di Jawa Barat, 2018 .....	41
Tabel 5. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Jenis Atap Terluas di Jawa Barat, 2018 .....	42
Tabel 6. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Jenis Dinding Terluas di Jawa Barat, 2018 .....	43
Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Sumber Air Minum utama di Jawa Barat, 2018 .....	44
Tabel 8. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Sumber Penerangan Utama di Jawa Barat Tahun 2018 .....	45
Tabel 9. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Penggunaan Fasilitas BAB di Jawa Barat, 2018 .....	46
Tabel 10. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Jawa Barat, 2018 .....	47



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Setiap manusia dimanapun berada membutuhkan tempat tinggal yang disebut rumah. Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area sekitarnya yang digunakan sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga (UU RI No.4 Tahun 1992). Rumah yang layak tidak harus besar dan mewah, tetapi harus memenuhi syarat kesehatan, sehingga para penghuninya dapat beraktivitas dengan nyaman. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah rumah antara lain: atap, lantai, dinding, ventilasi udara, pencahayaan, luas bangunan rumah, penyediaan air bersih, pembuangan tinja dan lain sebagainya.

Selain kondisi fisik rumah, maka kondisi lingkungan perumahan juga memegang peranan penting dalam menentukan kenyamanan penduduk dalam menjalankan aktivitasnya. Rumah yang berlokasi di lingkungan yang bersih, aman, bebas banjir, dan dekat dengan fasilitas umum serta jauh dari polusi industri/pabrik menjadi idaman setiap orang. Keberadaan rumah yang sehat, aman, dan nyaman sangat diperlukan agar fungsi dan kegunaan rumah dapat terpenuhi dengan baik.

Saat ini pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Perhatian pemerintah akan pentingnya rumah terbukti dengan dibangunnya Program Sejuta Rumah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah pemerintah juga menargetkan pembangunan rumah untuk generasi milenial yang tentunya dimasa yang akan datang membutuhkan hunian untuk tempat tinggal. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi angka *backlog* sebagai salah satu indikator dalam menghitung kebutuhan terkait perumahan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka membangun kebutuhan akan rumah dengan cara mendorong para pengembang untuk terus melaksanakan pembangunan perumahan bersubsidi. Program pembangunan perumahan lainnya seperti renovasi rumah tidak layak huni (Rutilahu), pemberian subsidi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta menjadikan program perumahan sebagai salah satu program prioritas di antara Sebelas Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

## **1.2. Tujuan Penulisan**

Publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan di bidang perumahan serta kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di samping berguna bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan dan perencanaan program ke depan, diharapkan publikasi ini juga dapat bermanfaat bagi pihak swasta dan para konsumen pengguna data lainnya.

Dalam publikasi ini disajikan informasi (data) mengenai kondisi perumahan di Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Informasi tentang kondisi perumahan meliputi status penguasaan rumah, luas lantai, jenis lantai, atap, dinding, sumber air minum rumah tangga, jarak penampungan kotoran (tinja) terhadap sumber air minum rumah tangga dan fasilitas tempat buang air besar.

## **1.3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Susenas Kor Maret 2018 dengan jumlah sampel sekitar 23.960 rumah tangga.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, dan sumber data yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang Karakteristik Perumahan di Jawa Barat.

## 1.5. Konsep dan Definisi

**Bangunan fisik** adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap, baik tetap maupun sementara, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan dapur, kamar mandi, garasi, dan lainnya yang terpisah dari bangunan induk dianggap bagian dari bangunan induk tersebut (satu bangunan) jika terletak dalam satu pekarangan. Bangunan yang luas lantainya kurang dari 10 m<sup>2</sup> dan tidak digunakan untuk tempat tinggal dianggap bukan bangunan fisik.

Contoh bangunan fisik: rumah, hotel, toko, pabrik, sekolah, masjid, kuil, gereja, gedung kantor, balai pertemuan, dan sebagainya.

**Bangunan sensus** adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri dan dalam satu kesatuan penggunaan.

**Rumah Tangga** adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

**Milik sendiri** adalah jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga (KRT) atau salah seorang anggota rumah tangga (ART). Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap milik sendiri.

**Kontrak** adalah jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/ART dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

**Sewa** adalah jika tempat tinggal tersebut disewa oleh KRT atau salah seseorang ART dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

**Status kepemilikan tempat tinggal lainnya** adalah jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat, rumah dinas, termasuk didalamnya rumah bebas sewa.

**Lantai** adalah alas/dasar suatu bangunan tempat tinggal responden. Jenis lantai terdiri dari keramik/marmer/granit, ubin/tegel/teraso, semen/bata merah, kayu/papan, bambu, tanah, dan lainnya. Lantai ubin yang dilapisi karpet atau vinil tetap dikategorikan ubin. Jika lantai bangunan tempat tinggal lebih dari satu jenis, pilih yang terluas.

**Luas lantai** adalah keseluruhan luas lantai dari setiap bagian bangunan (sebatas atap) yang ditempati (dihuni) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh rumah tangga, termasuk teras, garasi, tempat mencuci, WC, gudang, lantai setiap tingkat untuk bangunan bertingkat dalam satu bangunan sensus.

Luas lantai tempat tinggal rumah tangga tidak termasuk ruangan khusus untuk usaha, warung, restoran, toko, salon, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), lumbung padi dan lain-lain. Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah keseluruhan luas dari semua tingkat yang ditempati.

Catatan:

1. Jika satu bangunan sensus ditempati oleh beberapa rumah tangga, maka luas lantai ruangan yang dipakai bersama, luas lantainya dibagi dengan banyaknya rumah tangga yang menggunakannya.
2. Jika ada 2 bangunan terpisah yang ditempati oleh satu rumah tangga dan masih dalam satu blok sensus, maka luas lantainya dihitung seluruhnya.

3. Taman yang di dalam rumah, atau yang di samping rumah namun masih di bawah atap, semuanya ditambahkan sebagai luas lantai.

**Listrik non PLN** adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain Perusahaan Listrik Negara (PLN), termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari aki (*accu*), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang dikelola bukan oleh PLN).

**Listrik PLN meteran** adalah sumber penerangan yang diproduksi PLN dengan cara berlangganan dan ada meteran sebagai pengukur jumlah pemakaian listrik di rumah tangga. Termasuk dalam kategori ini adalah rumah tangga yang menggunakan satu meteran secara bersama-sama. Dalam SP2010, rumah tangga yang tinggal di apartemen dianggap memiliki sumber penerangan listrik PLN meteran.

**Listrik PLN tanpa meteran** adalah sumber penerangan yang diproduksi PLN tetapi tidak ada meteran yang terpasang di rumah. Termasuk dalam kategori ini adalah jika suatu rumah tangga mengambil listrik secara ilegal.

**Bukan listrik** adalah jika rumah tangga menggunakan sumber penerangan bukan listrik, seperti lampu gas elpiji (LPG) dan biogas yang dibangkitkan sendiri maupun berkelompok, sumber penerangan dari minyak tanah (petromak/lampu tekan, aladin, teplok, sentir, pelita, dan sejenisnya) dan lainnya (lampu karbit, lilin, biji jarak dan kemiri).

**Air kemasan** adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (330 ml, 600 ml, 1 liter, 12 liter atau 19 liter) dan kemasan gelas, seperti antara lain air kemasan merk Aqua, VIT, Ainess, Moya, 2 Tang, MQ, dan termasuk air minum isi ulang.

**Ledeng sampai rumah** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air sampai di rumah responden. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau

BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola pemerintah maupun swasta. Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air di tempat tertentu/umum. Rumah Tangga yang mendapatkan air ledeng dengan cara ini baik dengan cara membeli atau tidak termasuk dalam kategori ini. Ledeng eceran adalah rumah tangga yang minum dari air ledeng yang diperoleh dari pedagang air keliling dianggap mempunyai sumber air minum ledeng eceran.

**Pompa** adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).

**Sumur** adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali. Cara pengambilannya dengan menggunakan gayung atau ember, baik dengan maupun tanpa katrol. Air sumur dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu air sumur terlindung dan tidak terlindung.

**Sumur terlindung** adalah air yang berasal dari dalam tanah bila lingkaran sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur. Bila suatu rumah tangga menggunakan sumur terlindung sebagai sumber air minum, namun dalam mengambil (menaikkan) airnya, rumah tangga itu menggunakan pompa (pompa tangan atau pompa listrik), maka sumber air rumah tangga tersebut tetap dikategorikan sumur terlindung.

**Sumur tak terlindung** adalah air yang berasal dari dalam tanah bila lingkaran sumur tersebut tak dilindungi oleh tembok dan lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.

**Mata air** adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Rumah Tangga yang minum air yang berasal dari mata air yang ditampung dan dialirkan ke rumah dengan menggunakan pipa pralon/pipa ledeng tanpa proses penjernihan maka sumber air minumannya tetap mata air.

**Mata air terlindung** adalah bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

**Mata air tak terlindung** adalah bila mata air tersebut tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

**Air sungai** adalah air yang bersumber dari sungai.

**Air hujan** adalah air yang diperoleh dengan cara menampung air hujan.

**Sumber air lainnya** adalah jenis sumber air yang tidak termasuk kategori tersebut di atas, seperti air waduk/danau, air laut, dan kolam.

**Fasilitas tempat buang air besar/jamban sendiri** adalah jamban/kakus yang digunakan khusus oleh rumah tangga responden, walaupun kadang-kadang ada yang menumpang.

**Fasilitas buang air besar/jamban bersama** adalah jamban/kakus yang digunakan beberapa rumah tangga tertentu.

**Fasilitas tempat buang air besar/jamban umum** adalah jamban/kakus yang penggunaannya tidak terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapapun dapat menggunakannya.

**Tidak ada fasilitas tempat buang air besar/jamban** adalah tidak ada fasilitas jamban/kakus, misalnya lahan terbuka yang bisa digunakan untuk buang air besar (tanah lapang/kebun/halaman/semak belukar), pantai, sungai, danau, kolam, dan lainnya.

**Tangki septik** adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton, baik yang mempunyai bak resapan maupun tidak.

**Tempat pembuangan tanpa tangki septik** adalah tempat pembuangan tanpa tangki septik seperti cubluk, cemplung.

**Tidak punya tempat pembuangan** adalah tempat pembuangan akhir seperti kolam, sawah, sungai, danau, laut, lubang tanah, pantai, tanah lapang, kebun.

**Bahan bakar** adalah jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak seperti listrik, gas, minyak tanah, arang, kayu, lainnya.

<https://jabar.bps.go.id>

## **BAB 2**

### **KARAKTERISTIK PERUMAHAN JAWA BARAT**

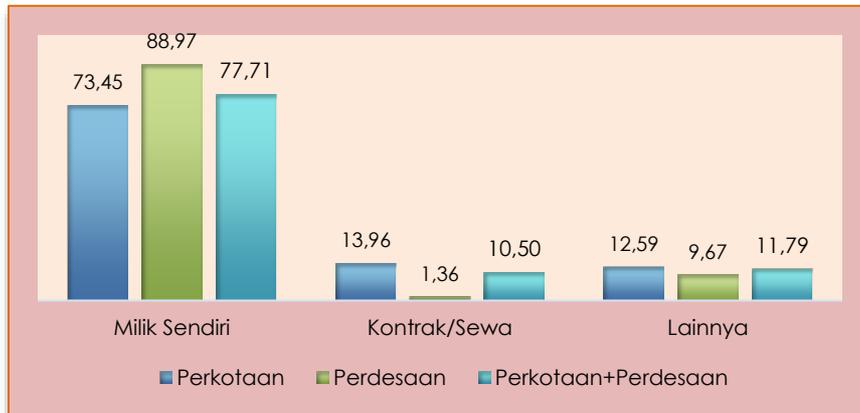
#### **2.1. Penguasaan Tempat Tinggal**

Status kepemilikan bangunan tempat tinggal (rumah) menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Adanya status tempat tinggal yang jelas, maka setidaknya akan memberikan ketenangan bagi rumah tangga penghuni rumah tersebut. Idealnya rumah tangga yang menempati bangunan dengan status "milik sendiri" akan merasa lebih aman dibanding rumah tangga dengan status penguasaan bangunan selain milik sendiri.

Pada tahun 2018 di Jawa Barat, persentase rumah tangga dengan penguasaan bangunan milik sendiri mencapai 77,71 persen. Rumah Tangga dengan penguasaan bangunan kontrak/sewa sebesar 10,50 persen. Sisanya sebanyak 11,79 persen merupakan rumah tangga dengan status bangunan lainnya (bebas sewa/dinas/lainnya).

Rumah tangga yang tidak tinggal di rumah milik sendiri tidak seluruhnya dianggap membutuhkan rumah, karena ada sebagian dari mereka yang tidak tinggal di suatu daerah secara permanen, misalnya mahasiswa, ataupun pekerja-pekerja yang mempunyai rumah di tempat lain. Persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan status milik sendiri di wilayah perkotaan relatif lebih rendah dibanding di wilayah perdesaan. Salah satu sebabnya adalah harga rumah di wilayah perkotaan relatif lebih mahal dibanding dengan di wilayah perdesaan. Oleh karena itu kemampuan rumah tangga untuk menempati rumah dengan status milik sendiri cenderung lebih sulit di wilayah perkotaan. Di wilayah perkotaan rumah tangga yang menempati rumah dengan status bangunan milik sendiri sebesar 73,45 persen sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 88,97 persen. Rata-rata perkotaan dan perdesaan mencapai 77,71 persen.

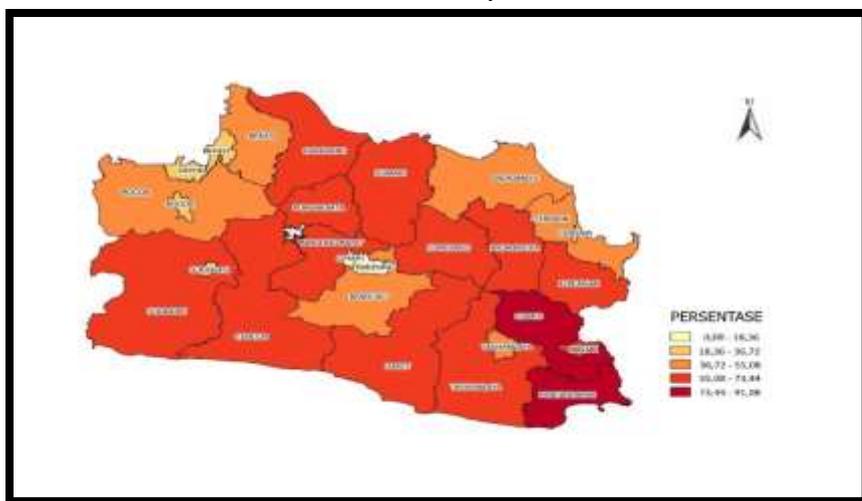
**Gambar 1. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Status Wilayah dan Penguasaan Bangunan di Jawa Barat, 2018**



Sumber : Susenas 2018, diolah

Jika dirinci menurut kabupaten/kota, Kabupaten Pangandaran merupakan wilayah dengan persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan status bangunan milik sendiri dengan persentase tertinggi, yaitu mencapai 91,80 persen. Sebaliknya Kota Cimahi, merupakan wilayah dengan persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan status bangunan milik sendiri terendah dibanding dengan wilayah lain di Jawa Barat, yaitu sebesar 51,51 persen.

**Gambar 2. Peta Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Penguasaan Bangunan dengan Status Milik Sendiri di Jawa Barat, 2018**

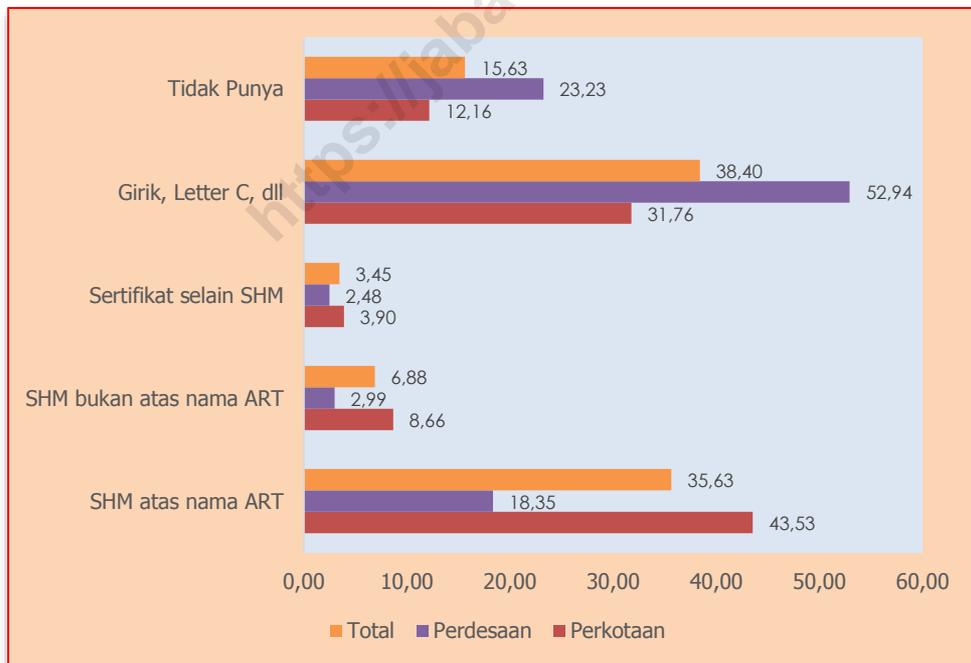


Sumber : Susenas 2018, diolah

## 2.2. Status Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal

Disamping status tanah bangunan tempat tinggal, bukti kepemilikan tanah bangunan yang sah seperti sertifikat/bukti lain akan memberikan ketenangan bagi pemilik bangunan tersebut. Adanya bukti kepemilikan tanah bangunan tersebut menunjukkan status bangunan yang ditempatkan rumah tangga mempunyai kekuatan hukum. Seperti diketahui bersama di antara bukti kepemilikan yang ada, Sertifikat Hak milik (SHM) merupakan bukti kepemilikan yang paling kuat secara hukum. Jenis kepemilikan ini dapat dialihkan (dijual, dihibah atau diwariskan) secara turun temurun. Rumah Tangga yang memegang Sertifikat Hak Milik (SHM), mempunyai kepemilikan penuh atas hak lahan dan/atau tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut.

**Gambar 3. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Status Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal di Jawa Barat, 2018**



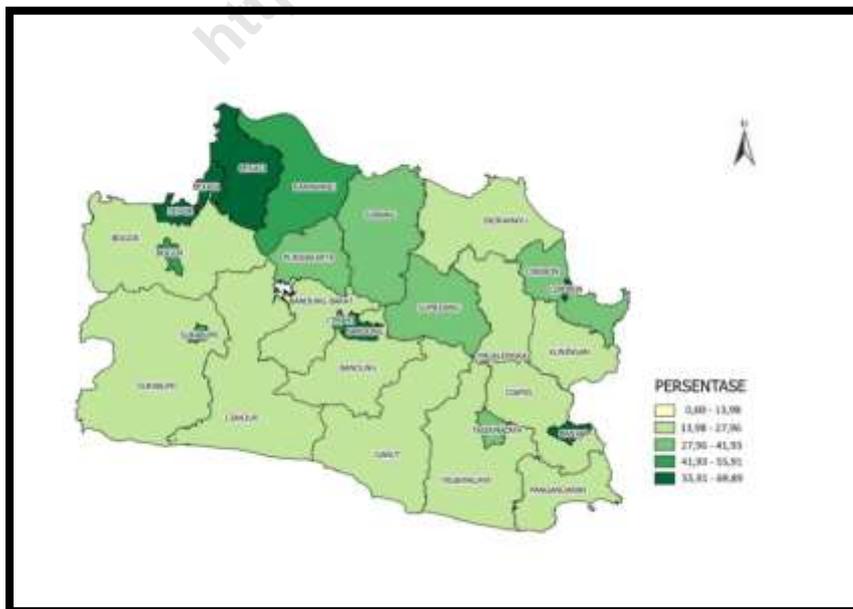
Sumber : Susenas 2018, diolah

Hasil Susenas tahun 2018 memperlihatkan bahwa dari seluruh rumah tangga yang menempati bangunan dengan status milik sendiri sebagian

besar bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggalnya masih berupa surat girik/*letter C*, persentasenya mencapai 38,40 persen. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah, mengingat bukti kepemilikan tanah yang berupa girik maupun *letter C* sangat rentan untuk digugat.

Rumah Tangga yang memiliki SHM atas kepemilikan tanah bangunan yang ditempati baru berkisar 42,51 persen. Terbagi dalam SHM atas nama ART sebesar 35,63 persen dan SHM atas nama bukan ART sebesar 6,88 persen. Bukti kepemilikan tanah bangunan untuk rumah tangga di wilayah perkotaan sebagian besar sudah berupa SHM. Persentasenya mencapai 52,19 persen, terdiri dari SHM atas nama ART sendiri sebesar 43,53 persen dan SHM atas nama bukan ART sebesar 8,66 persen. Adapun untuk wilayah perdesaan sebagian besar bukti kepemilikannya masih berupa Girik/*letter C*, dimana persentasenya sebesar 52,94 persen. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat di wilayah perkotaan untuk melakukan legalitas atas tanah bangunan yang dimiliki cenderung lebih tinggi dibanding wilayah perdesaan.

**Gambar 4. Peta Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Status Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal Berupa SHM Atas Nama ART di Jawa Barat, 2018**



Sumber : Susenas 2018, diolah

Apabila dirinci menurut kabupaten/kota, Kota Bekasi merupakan wilayah dimana rumah tangga dengan bukti kepemilikan status tanah bangunan tempat tinggal berupa SHM atas nama ART sendiri memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 69,89 persen. Adapun Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur merupakan wilayah dengan persentase terendah, dimana rumah tangga yang memiliki bukti kepemilikan bangunan berupa SHM atas nama ART, masing-masing sebesar 16,58 dan 16,59 persen. Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah dengan persentase tertinggi rumah tangga dengan bukti kepemilikan status tanah bangunan tempat tinggal berupa girik/*letter C*, dimana persentasenya mencapai 67,77 persen. Persentase terendah dengan bukti kepemilikan berupa girik/*letter C* berada di Kota Bandung dengan persentase sebesar 4,46 persen.

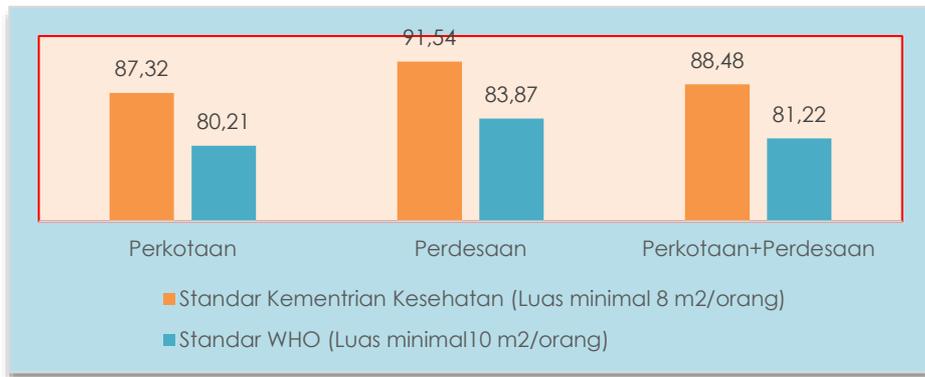
### **2.3. Rata-Rata Luas Lantai per Kapita**

Menurut standar *World Health Organization* (WHO) tentang rumah layak huni disebutkan bahwa rumah yang sehat adalah rumah dengan luas per kapitanya minimal sebesar 10 m<sup>2</sup>/orang. Artinya dengan asumsi satu rumah tangga terdiri dari 4 (empat) orang maka rumah yang sehat menurut ukuran WHO, rumah tangga tersebut harus memiliki rumah dengan luas 40 m<sup>2</sup>. Adapun menurut Kementerian Kesehatan standar rumah sehat adalah dengan luas per kapitanya minimal sebesar 8 m<sup>2</sup>/orang.

Di samping tingkat derajat kesehatan penghuninya, luas lantai juga sering dianggap sebagai gambaran tingkat kesejahteraan/status sosial penghuninya. Semakin luas lantai yang dimiliki oleh suatu rumah tangga maka asumsinya semakin sehat dan sejahtera penghuninya.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2018, jika merujuk pada standar Kementerian Kesehatan maka persentase rumah tangga dengan luas rata-rata per kapita ideal (minimal 8 meter persegi) sebesar 88,48 persen. Adapun bila merujuk pada standar WHO dimana luas per kapita ideal (minimal 10 meter persegi) maka persentase rumah tangga di Jawa Barat dengan luas per kapita ideal sebesar 81,22 persen.

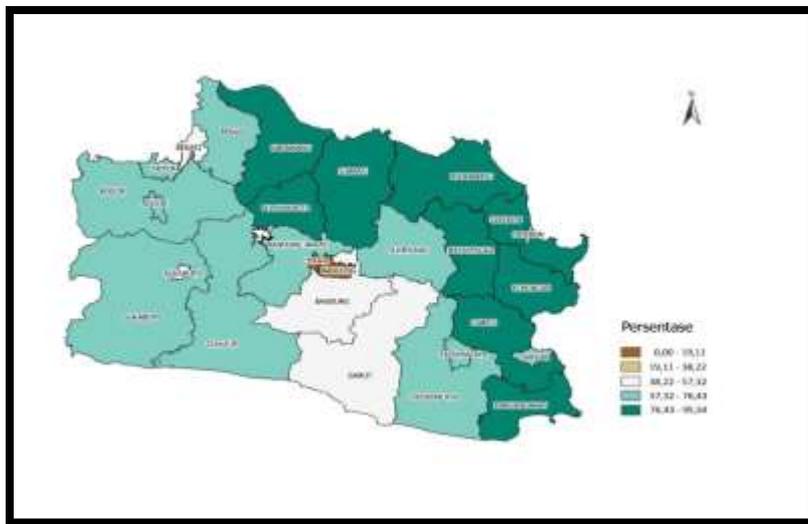
**Gambar 5. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Status Wilayah dan Luas per Kapita Bangunan Tempat Tinggal di Jawa Barat, 2018**



Sumber : Susenas 2018, diolah

Persentase luas per kapita ideal untuk wilayah perkotaan relatif lebih rendah dibanding wilayah perdesaan. Persentase luas per kapita ideal berdasarkan standar Kementerian Kesehatan (minimal 8 meter persegi) untuk wilayah perkotaan sebesar 87,32 persen, sedangkan berdasarkan standar WHO (minimal 10 meter persegi) sebesar 80,21 persen.

**Gambar 6. Peta Sebaran Persentase Rumah Tangga dengan Luas Per Kapita Bangunan Tempat Tinggal di Atas 8 m<sup>2</sup> di Jawa Barat, 2018**



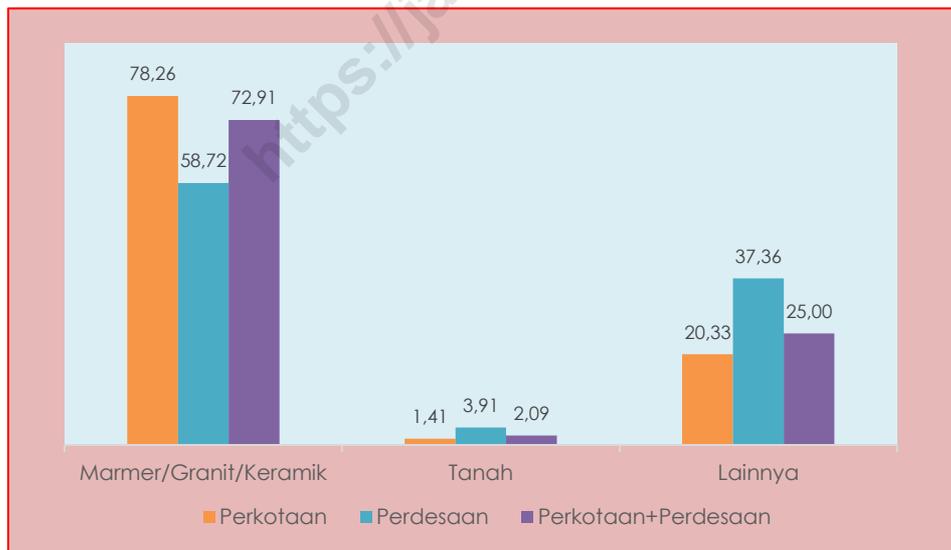
Sumber : Susenas 2018, diolah

Jika merujuk pada standar Kementerian Kesehatan, Kota Cimahi merupakan wilayah dengan persentase rumah tangga dengan luas per kapita ideal terendah yaitu hanya berkisar 70,33 persen. Adapun Kabupaten Majalengka merupakan wilayah dengan persentase rumah tangga dengan luas per kapita ideal tertinggi yaitu sebesar 95,54 persen.

## 2.4. Jenis Lantai Terluas

Ditinjau dari sisi kesehatan, lantai bukan tanah dianggap lebih baik dibandingkan lantai tanah, bahkan rumah berlantai tanah dianggap sebagai salah satu kategori dari rumah tidak layak huni. Urutan dari yang paling baik untuk lantai bukan tanah menurut kualitasnya adalah keramik/marmer/granit, ubin/tegel/teraso, semen/bata merah, kayu/papan, bambu dan lainnya.

**Gambar 7. Persentase Rumah Tangga dirinci Menurut Jenis Lantai Terluas di Jawa Barat, 2018**



Sumber : Susenas 2018, diolah

Di Provinsi Jawa Barat, sebagian besar rumah tangga (72,91 persen) sudah menggunakan marmer/keramik sebagai lantai rumah tempat tinggal. Sebagian besar rumah tangga dengan jenis lantai ini

terdapat di daerah perkotaan (78,26 persen) sedangkan di perdesaan hanya 58,72 persen. Namun demikian di Provinsi Jawa Barat masih terdapat rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal yang berlantai tanah (2,09 persen).

Kota Bekasi merupakan wilayah dimana persentase rumah tangga dengan lantai terluas bangunan tempat tinggal berupa marmer/keramik tertinggi di Jawa Barat yaitu sebesar 94,81 persen. Adapun wilayah dengan persentase bangunan rumah tangga dengan lantai terluas jenis marmer/keramik terendah ada di Kabupaten Cianjur, dimana persentasenya sebesar 49,86 persen.

**Gambar 8. Peta Sebaran Persentase Bangunan Rumah Tangga dengan Lantai Terluas Berupa Marmer/Keramik di Jawa Barat, 2018**



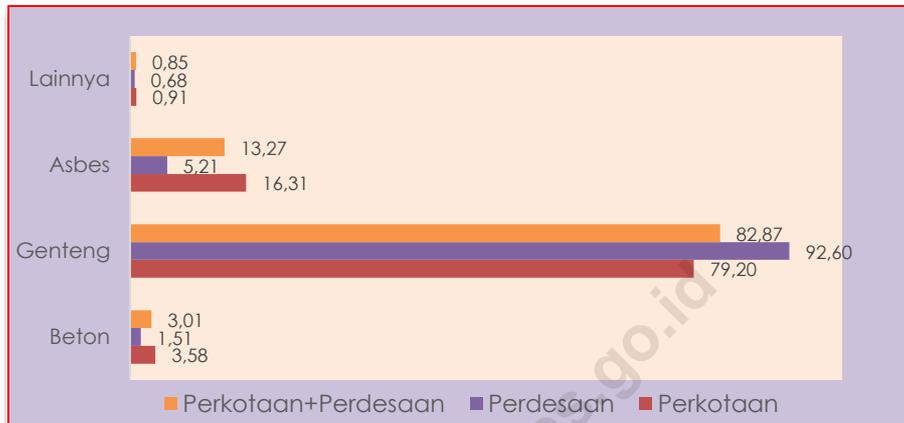
Sumber : Susenas 2018, diolah

## 2.5. Jenis Atap Terluas

Atap merupakan elemen penting dari sebuah rumah di samping memberikan perlindungan dari perubahan cuaca/iklim panas maupun hujan, atap juga dapat memberikan nilai estetika bagi penghuninya. Atap yang kuat dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penghuninya. Hasil Susenas tahun 2018 menggambarkan bahwa jenis atap terluas yang paling banyak digunakan rumah tangga di Jawa Barat adalah genteng, asbes dan beton. Persentase rumah tangga dengan atap terluas genteng sebesar 82,87

persen kemudian asbes sebesar 13,27 persen dan yang beratap beton sebesar 3,01 persen. Sisanya sebesar 0,85 persen berupa atap seng, bambu dan lainnya.

**Gambar 9. Persentase Bangunan Rumah Tangga Dirinci Menurut Wilayah dan Jenis Atap Terluas di Jawa Barat, 2018**

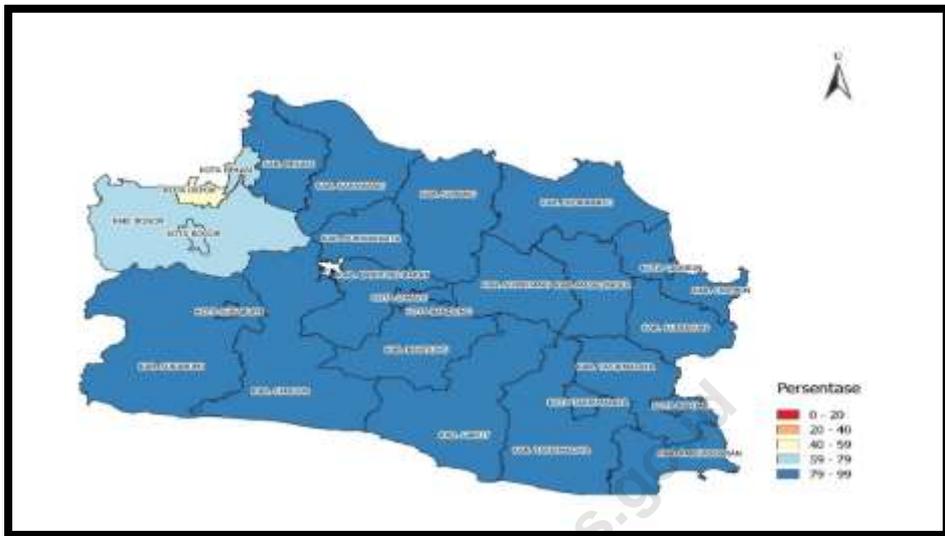


Sumber : Susenas 2018, diolah

Penggunaan atap genteng lebih tinggi di wilayah perdesaan dibanding wilayah perkotaan. Di perdesaan penggunaan genteng sebagai atap terluas persentasenya mencapai 92,60 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 79,20 persen. Sebaliknya penggunaan asbes sebagai atap terluas di wilayah perkotaan lebih tinggi dibanding di wilayah perdesaan. Di wilayah perkotaan penggunaan asbes sebagai atap terluas sebesar 16,31 persen sedangkan di perdesaan sebesar 5,21 persen. Hal ini sejalan dengan banyaknya rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan/sewa. Sebagian besar rumah kontrakan/sewa menggunakan asbes untuk atap rumahnya.

Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal dengan atap terluas berupa genteng terdapat di wilayah Kabupaten Kuningan persentasenya mencapai 97,55 persen. Adapun yang terendah di wilayah Kota Depok persentasenya hanya berkisar 47,21 persen. Penggunaan asbes sebagai atap terluas masih banyak dijumpai di kota-kota besar di Jawa Barat, seperti Kota Depok (48,19 persen), Kota Bekasi (37,32 persen) dan Kota Bogor (28,31 persen).

**Gambar 10. Peta Sebaran Persentase Rumah Tangga dengan Atap Terlulus Bangunan Tempat Tinggal Berupa Beton/Genteng di Jawa Barat, 2018**

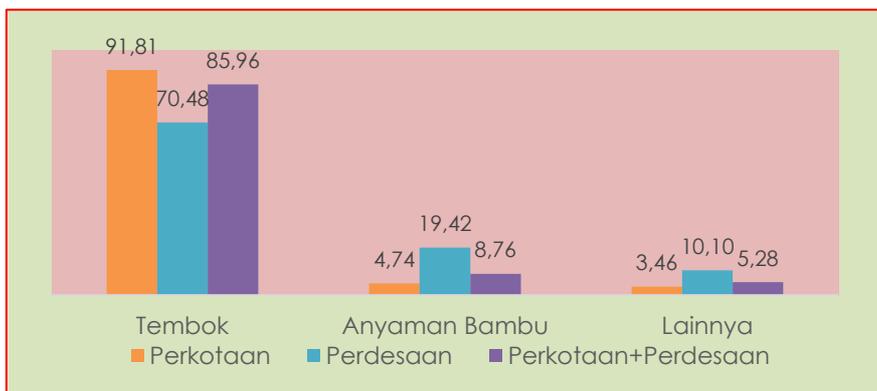


Sumber : Susenas 2018, diolah

## 2.6. Jenis Dinding Terlulus

Dinding sebagai salah satu komponen sebuah bangunan, mempunyai fungsi sebagai tiang penyangga. Kokoh tidaknya suatu bangunan salah satunya digambarkan dari jenis dinding bangunan tersebut.

**Gambar 11. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Wilayah dan Jenis Dinding Terlulus di Jawa Barat, 2018**



Sumber : Susenas 2018, diolah

Hasil Susenas tahun 2018 menggambarkan bahwa sebagian besar tempat tinggal rumah tangga di Jawa Barat mempunyai dinding tembok. Persentase rumah tangga di Jawa Barat dengan tempat tinggal dengan jenis dinding tembok adalah berkisar 85,96 persen. Secara umum hal ini digambarkan oleh penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, persentase rumah tangga dengan tempat tinggal berdinding tembok sebesar 91,81 persen. Adapun di wilayah perdesaan rumah tangga dengan tempat tinggal dengan dinding tembok sebesar 70,48 persen. Dinding dengan anyaman bambu masih cukup banyak ditemui di wilayah perdesaan, persentasenya sebesar 19,42 persen.

Rumah Tangga yang menempati tempat tinggal dengan jenis dinding tembok, persentase terendah ada di wilayah Kabupaten Cianjur yaitu sebesar 62,58 persen. Adapun persentase tertinggi rumah tangga dengan tempat tinggal berdinding tembok berada di wilayah Kota Bogor (98,90 persen). Untuk tempat tinggal dengan jenis dinding terluas berupa anyaman bambu paling banyak ditemui di wilayah Kabupaten Cianjur, persentasenya mencapai 28,61 persen. Kondisi ini dapat dimaklumi karena Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah sentra anyaman bambu di Jawa Barat.

**Gambar 12. Peta Sebaran Persentase Rumah Tangga dengan Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal Berupa Tembok di Jawa Barat, 2018**



Sumber : Susenas 2018, diolah

## **2.7. Fasilitas Air Minum**

Air merupakan salah satu komponen terpenting dalam kehidupan manusia. Menurut penelitian, komposisi air dalam tubuh manusia dewasa rata-rata sebesar 70 persen. Manusia dapat bertahan hidup tanpa makan selama 5 minggu, namun manusia dapat bertahan hidup tanpa air maksimal selama 5 hari (*Hydration Health* Indonesia). Kekurangan air akan menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Dalam satu hari seseorang membutuhkan air minum rata-rata 1,5 liter (sekitar 8 gelas). Peranan air sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. Di samping pemenuhan kebutuhan akan air harus mencukupi, tentunya harus diperhatikan juga faktor kebersihan dan kesehatan air yang digunakan. Air yang baik untuk dikonsumsi adalah air yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak mengandung logam berat dan zat berbahaya, serta tidak mengandung bakteri atau parasit.

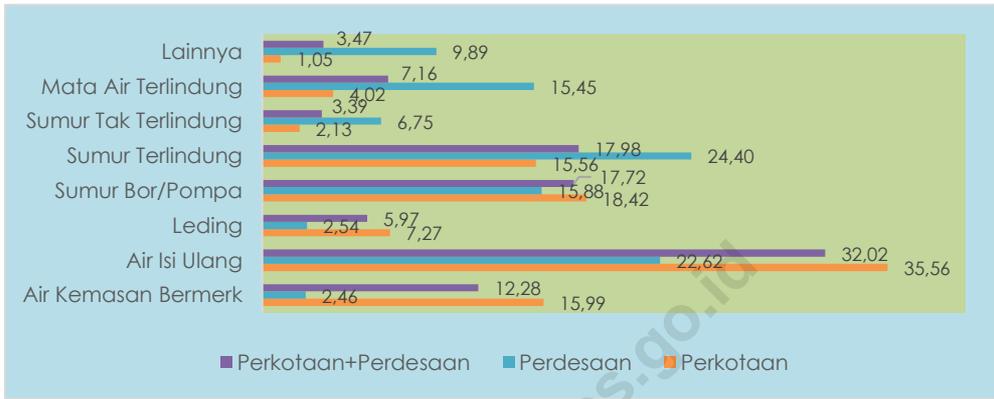
### **2.7.1. Sumber Air Minum**

Berdasarkan hasil Susenas 2018, sebagian besar rumah tangga di perkotaan menggunakan air isi ulang (35,56 persen), sumur bor/pompa (18,42 persen) dan air kemasan (15,99 persen) sebagai sumber air minum. Untuk rumah tangga di perdesaan, sebagian besar rumah tangga menggunakan sumur terlindung (24,40 persen), air isi ulang (22,62 persen) dan mata air terlindung (15,45 persen) sebagai sumber air minum. Adapun secara keseluruhan, untuk daerah perkotaan dan perdesaan sebagian besar rumah tangga menggunakan air isi ulang (32,02 persen), sumur terlindung (17,98 persen) dan sumur bor/pompa (17,72 persen) sebagai sumber air minum.

Gambaran ini menunjukkan bahwa leding belum menjadi pilihan utama sebagai sumber air minum, padahal harga leding jauh lebih murah dibandingkan air kemasan. Hal ini harus menjadi tantangan bagi perusahaan penyedia air leding untuk tetap menjaga dan meningkatkan

kualitas air leding yang sehat, berkualitas, terjangkau sehingga dapat membuat masyarakat beralih menggunakan air leding sebagai sumber utama air minum.

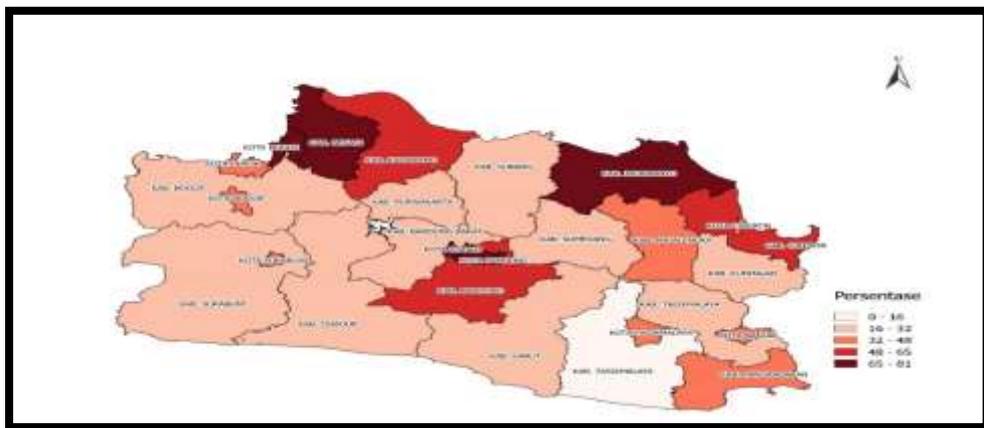
**Gambar 13. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Sumber Air Minum Utama di Jawa Barat, 2018**



Sumber : Susenas 2018, diolah

Penggunaan air leding terbanyak terdapat di Kota Cirebon, persentase rumah tangga yang sumber utama air minumnya dari leding sebesar 46,46 persen. Adapun yang terendah adalah di Kabupaten Pangandaran, di wilayah ini rumah tangga yang menggunakan ledeng sebagai sumber utama air minum persentasenya hanya 0,31 persen.

**Gambar 14. Peta Sebaran Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Utama Berupa Air Kemasan/ Air Isi Ulang di Jawa Barat, 2018**

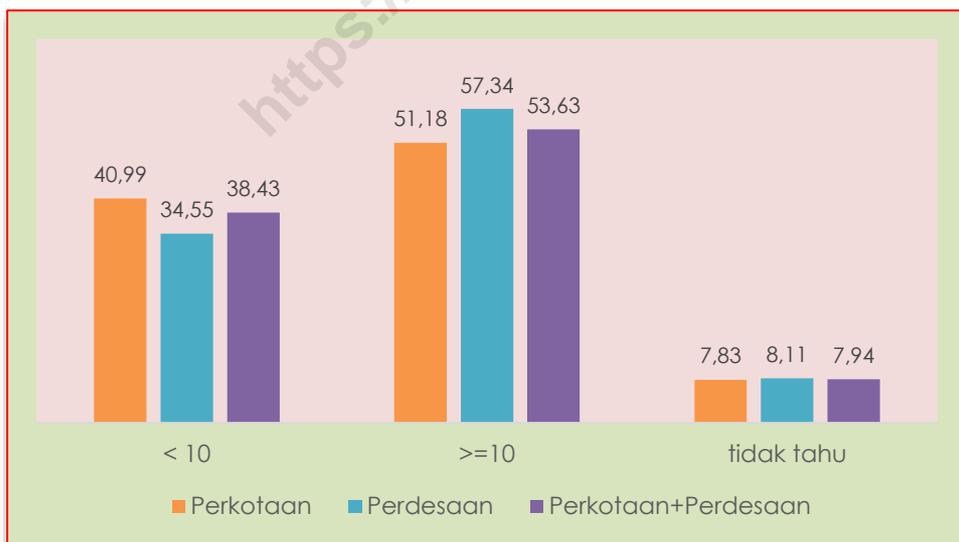


Sumber : Susenas 2018, diolah

### 2.7.2. Jarak Sumber Air Minum dengan penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat

Pertanyaan terkait jarak sumber air minum dengan penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat, ditanyakan kepada rumah tangga yang mengkonsumsi sumber air minum yang bersumber dari sumur/mata air. Dilihat dari sisi kesehatan sebaiknya sumber air minum yang berupa sumur/mata air jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja harus lebih dari 10 meter. Di Jawa Barat persentase rumah tangga yang menggunakan sumur/mata air sebagai sumber air minum dengan jarak ke penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat kurang dari 10 meter sebesar 38,43 persen. Adapun 7,94 persen rumah tangga tidak mengetahui jaraknya, dan sisanya 53,63 persen adalah rumah tangga dengan jarak sumber air minum lebih dari 10 meter.

**Gambar 15. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Limbah/ Kotoran/Tinja Terdekat di Jawa Barat, 2018**



Sumber : Susenas 2018, diolah

### 2.7.3. Air Minum Layak

Definisi air minum yang berkualitas (layak) adalah apabila sumber air minum yang digunakan rumah tangga berasal dari leding, air terlindung (pompa/sumur bor, sumur terlindung, mata iar terlindung) dengan jarak  $\geq$  10 meter dari penampungan kotoran/limbah dan air hujan dikombinasikan dengan penggunaan air mandi/cuci yang bersumber dari air terlindung (leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan) bila sumber air minum utama menggunakan air kemasan/isi ulang dan air tak terlindungi (air terlindungi dengan jarak  $<$  10 meter dan air tidak terlindungi).

Di Jawa Barat persentase rumah tangga yang mengkonsumsi air minum layak selama 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Hal ini tentunya menjadi gambaran yang menggembirakan karena dengan mengkonsumsi air minum layak diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2018 persentase rumah tangga yang mengkonsumsi air minum layak sebesar 71,06 persen atau meningkat sebesar persen dibanding keadaan tahun 2017, di mana persentasenya mencapai 70,50 persen.

**Gambar 16. Perkembangan Persentase Rumah Tangga yang Mengkonsumsi Air Minum Layak di Jawa Barat, 2014-2018**



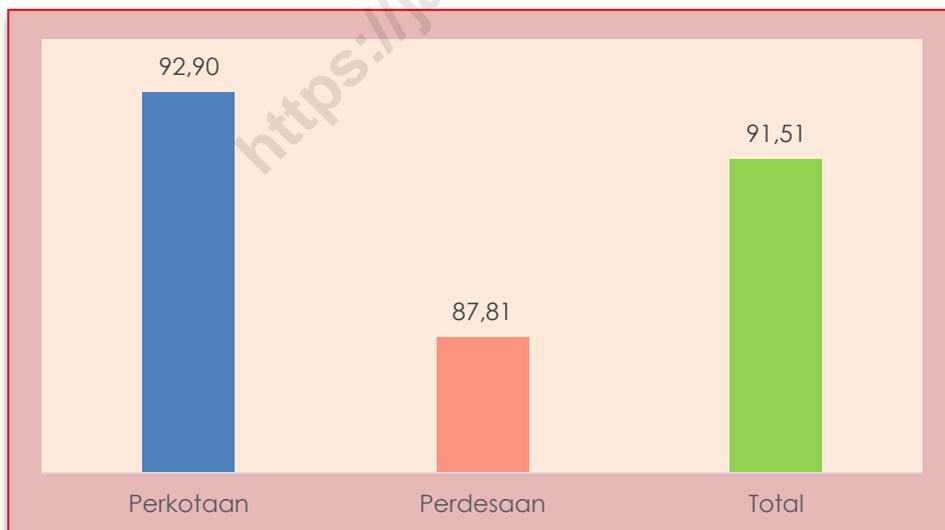
Sumber : Susenas 2014-2018, diolah

## 2.8. Sumber Penerangan Utama

Memasuki masa globalisasi dan era digitalisasi, kebutuhan akan listrik sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Kualitas hidup manusia pada saat sekarang sudah sangat bergantung pada penyediaan listrik. Pemerintah saat ini tengah menggenjot program pembangkit listrik 35 ribu Megawatt semata-mata untuk memenuhi kebutuhan listrik secara merata. Listrik selain sebagai sumber penerangan juga sebagai faktor pendukung pengembangan teknologi.

Salah satu aspek perumahan yang dapat dibahas melalui hasil susenas adalah aspek sumber penerangan utama rumah tangga. Dengan penerangan yang cukup, manusia bisa hidup sehat dan nyaman beraktifitas.

**Gambar 17. Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN (Meteran) di Jawa Barat, 2018**

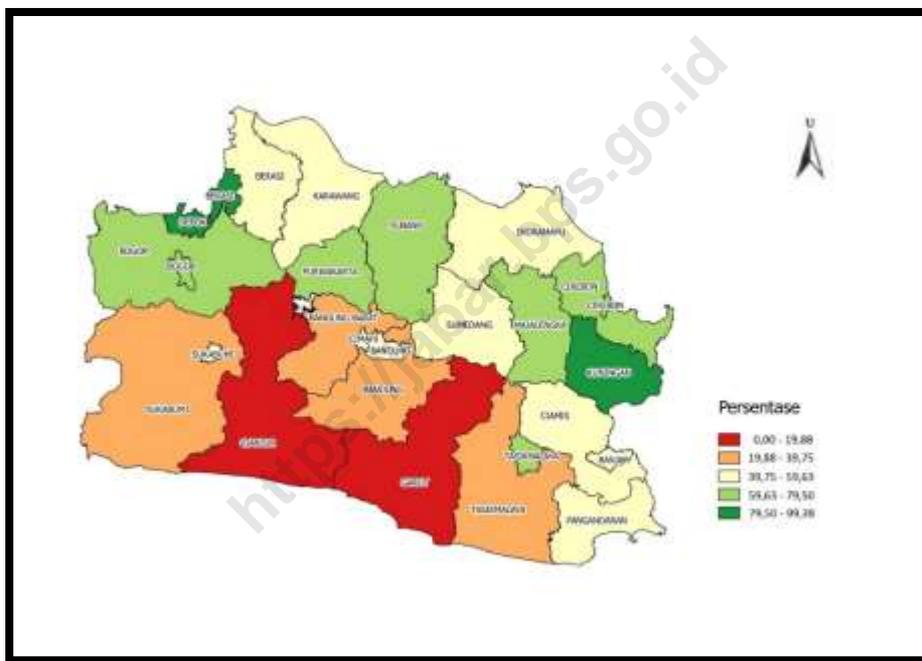


Sumber : Susenas 2018, diolah

Hasil Susenas tahun 2018 memperlihatkan bahwa hampir semua rumah tangga di Provinsi Jawa Barat sudah menikmati pembangunan infrastruktur listrik. Sebanyak 99,83 persen rumah tangga sudah

menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama, dan hanya 0,06 persen rumah tangga yang belum menggunakan listrik. Rumah Tangga yang sudah menggunakan penerangan listrik sebagian besar bersumber pada PLN dengan menggunakan meteran sendiri (91,51 persen). Akan tetapi, masih ada juga rumah tangga yang menggunakan listrik PLN tanpa meteran/nyantol yaitu sebanyak 8,32 persen.

**Gambar 18. Peta Sebaran Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Utama Berupa Listrik PLN dengan Meteran di Jawa Barat, 2018**



Sumber : Susenas 2018, diolah

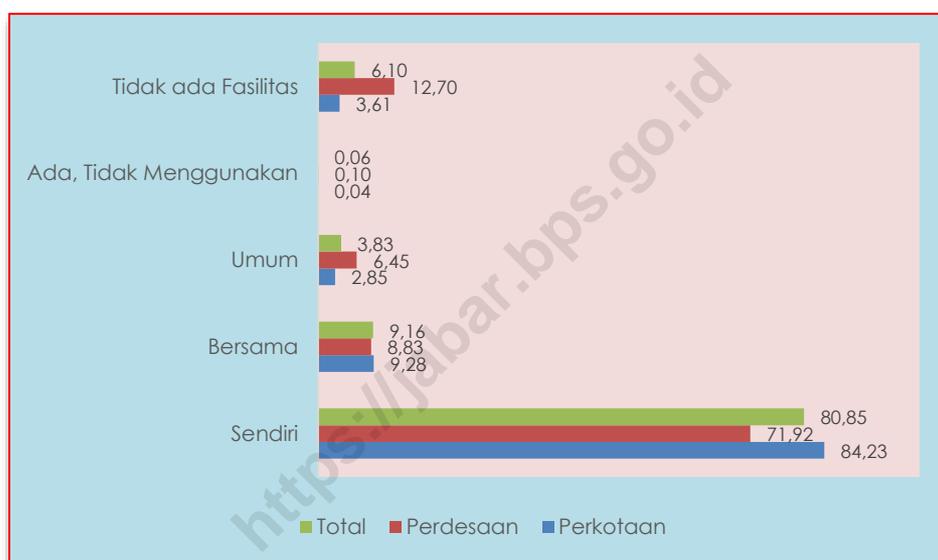
## 2.9. Sanitasi rumah tangga

Salah satu tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development goals*), tujuan keenam adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua. Salah satu indikator yang digunakan adalah dengan menghitung persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.

### 2.9.1. Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Salah satu kebutuhan penting dalam rumah tinggal adalah tersedianya fasilitas sanitasi seperti tempat buang air besar. Dengan memiliki fasilitas tempat pembuangan air besar sendiri, maka rumah tangga akan lebih dapat menjaga kesehatan dan kebersihan fasilitas tersebut.

**Gambar 19. Persentase Rumah Tangga dengan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Jawa Barat, 2018**



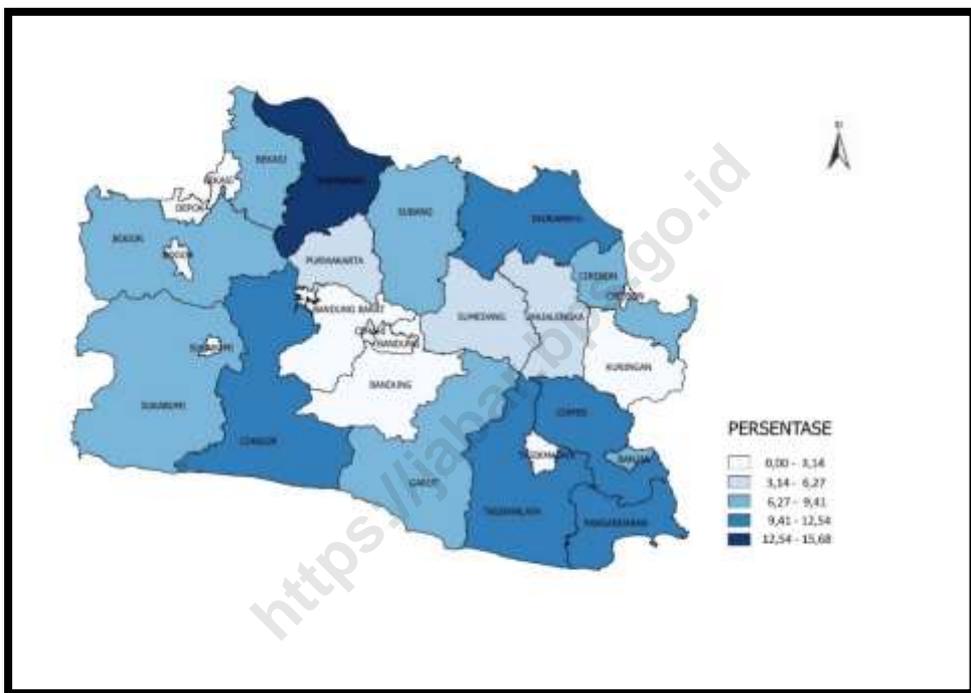
Sumber : Susenas 2018, diolah

Berdasarkan hasil Susenas 2018, sebagian besar rumah tangga di perkotaan maupun perdesaan telah memiliki jamban sendiri yaitu sebesar 84,23 persen. Adapun untuk rumah tangga yang fasilitas buang air besarnya dengan jamban umum, di perkotaan hanya sebesar 2,85 persen dan di perdesaan sebesar 6,45 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan kebersihan fasilitas buang air besar semakin tinggi.

Persentase tertinggi rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri tertinggi di Jawa Barat adalah Kota Depok. Di Kota Depok

persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri sebesar 98,01 persen. Adapun persentase yang terendah adalah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya persentasenya hanya berkisar 64,07 persen.

**Gambar 20. Peta Sebaran Persentase Rumah Tangga Yang Tidak Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Jawa Barat, 2018**



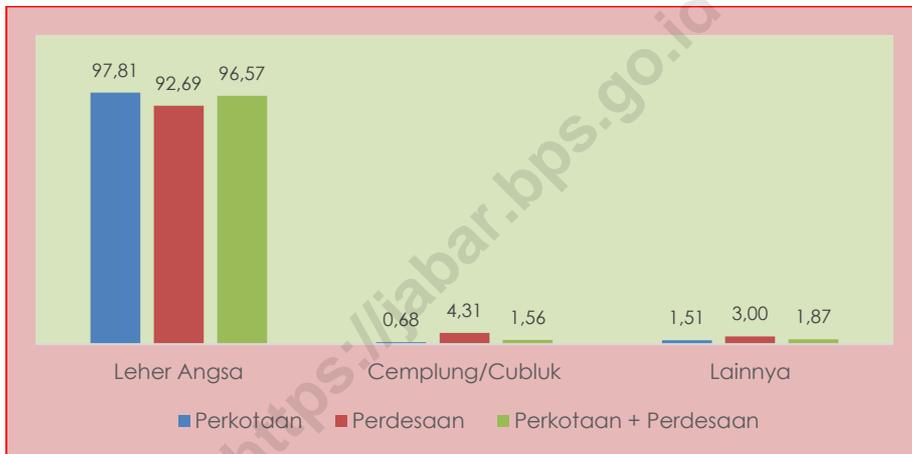
Sumber : Susenas 2018, diolah

### 2.9.2. Jenis Kloset yang Digunakan

Berbagai macam bentuk jamban/kloset yang lazim digunakan di Indonesia, antara lain jamban leher angsa, plengsengan dengan tutup, plengsengan tanpa tutup dan cemplung/cubluk. Jamban leher angsa adalah jamban leher lubang closet berbentuk lengkungan, dengan demikian air akan terisi gunanya sebagai sumbat sehingga dapat mencegah bau busuk serta masuknya binatang-binatang kecil. Jamban model ini adalah model terbaik yang dianjurkan dalam kesehatan lingkungan (Warsito, 1996).

Hasil Susenas 2018 menggambarkan bahwa sebagian besar rumah tangga yang mempunyai fasilitas jamban sendiri/bersama menggunakan jenis jamban berbentuk leher angsa, dimana persentasenya mencapai 96,57 persen. Masih ada sekitar 1.56 persen yang menggunakan jamban cubluk/cemplung. Untuk daerah perkotaan yang menggunakan jamban berbentuk leher angsa sebesar 97,81 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 92,69 persen. Penggunaan cubluk/cemplung di daerah perdesaan masih ada yaitu berkisar 4,31 persen.

**Gambar 21. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Jenis Kloset yang Digunakan di Jawa Barat, 2018**



Sumber : Susenas 2018, diolah

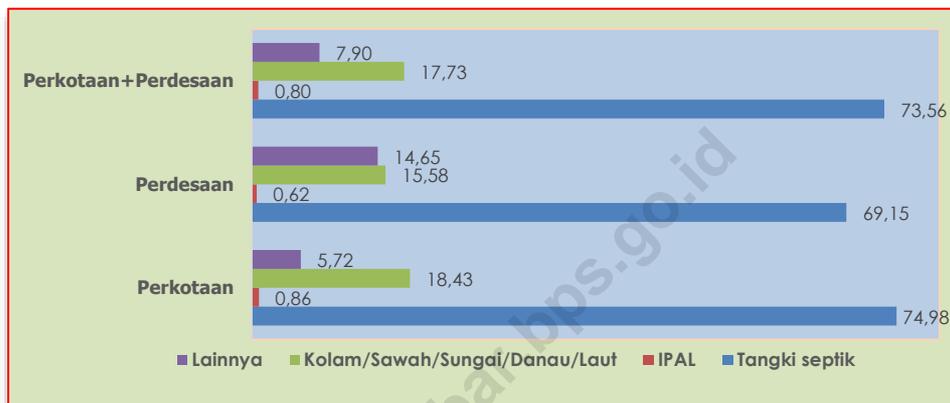
### 2.9.3. Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Selain kepemilikan fasilitas pembuangan air besar maka faktor tempat penampungan kotoran/tinja juga sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup. Dengan memiliki fasilitas tempat pembuangan akhir tinja/kotoran yang memenuhi syarat sanitasi maka pencemaran lingkungan dan kualitas air tanah dapat tetap terjaga. Saat ini tempat penampungan yang paling memenuhi syarat kesehatan adalah tangki septik atau Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL).

Berdasarkan data hasil Susenas 2018, sebagian besar rumah tangga di Provinsi Jawa Barat yang memiliki jamban telah memiliki tangki

septik. Untuk daerah perkotaan, persentase rumah tangga yang telah memiliki tangki septik mencapai 74,98 persen dan untuk daerah perdesaan mencapai 69,15 persen. Adapun secara keseluruhan, baik perdesaan maupun perkotaan sebagian besar rumah tangga telah memiliki tangki septik dengan persentase sebesar 73,56 persen.

**Gambar 22. Persentase Rumah Tangga Dirinci menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Jawa Barat, 2018**



Sumber : Susenas 2018, diolah

Penggunaan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir tinja masih jarang dilakukan oleh rumah tangga di Kabupaten Sukabumi. Di wilayah ini persentase rumah tangga yang menggunakan tangki septik baru berkisar 45,20 persen saja. Persentasenya terendah di seluruh wilayah di Jawa Barat. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah daerah setempat, khususnya dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya.

**Gambar 23. Peta Sebaran Persentase Rumah Tangga dengan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Berupa Tangki Septik/IPAL di Jawa Barat, 2018**



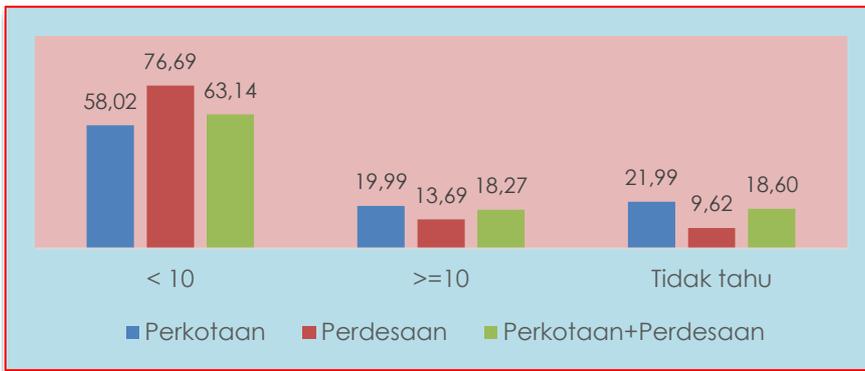
Sumber : Susenas 2018, diolah

#### **2.9.4. Waktu Pembuatan Tangki Septik**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar masyarakat di Jawa Barat sudah membuat tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Dengan mengetahui waktu pembuatan tangki septik diharapkan dapat mengukur kualitas tangki septik yang digunakan.

Pada Gambar 24 memperlihatkan sebanyak 63,14 persen masyarakat Jawa Barat membuat tangki septik kurang dari 10 tahun. Sekitar 18,27 persen pembuatan tangki septik telah dilakukan lebih dari 10 tahun. Namun demikian, hasil Susenas tahun 2018 juga memperlihatkan masih cukup banyak rumah tangga yang tidak mengetahui pembuatan tangki septik yaitu berkisar 18,60 persen. Kemungkinan rumah tangga tersebut merupakan rumah tangga yang berstatus kontrak/sewa sehingga tidak mengetahui kapan pembuatan tangki septik.

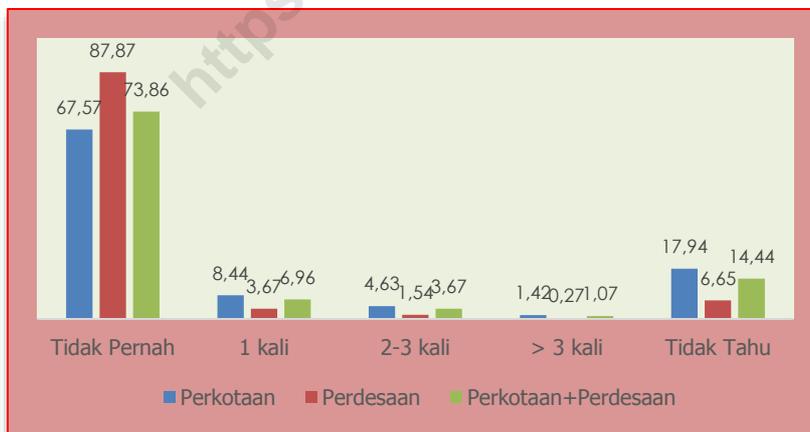
**Gambar 24. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Sudah Berapa Lama Tangki Septik Dibuat di Jawa Barat, 2018**



Sumber : Susenas 2018, diolah

Dari Hasil Susenas 2018 memperlihatkan bahwa 73,86 persen rumah tangga di Jawa Barat tidak pernah melakukan penyedotan tangki septik dalam 5 tahun terakhir.

**Gambar 25. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Status Wilayah dan Frekuensi Pengosongan/Penyedotan Tangki Septik Dalam Lima Tahun Terakhir di Jawa Barat, 2018**



Sumber : Susenas 2018, diolah

Persentase rumah tangga di wilayah perdesaan yang tidak melakukan penyedotan tangki septik relatif lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan, persentasenya mencapai 87,87 persen, sedangkan wilayah perkotaan persentasenya 67,57 persen. Kesadaran masyarakat akan arti

pentingnya pemeliharaan tangki septik harus perlu ditingkatkan, mengingat tangki septik yang tidak dilakukan penyedotan dikhawatirkan pada akhirnya limbah tinja akan mencemari tanah.

### 2.9.5. Sanitasi Layak

Menurut konsep definisi sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Di provinsi Jawa Barat selama tahun 2014 – 2018, persentase rumah tangga dengan sanitasi layak mengalami fluktuatif. Selama periode lima tahun tersebut persentase sanitasi layak mengalami peningkatan semenjak tahun 2015. Pada tahun 2018 persentasenya sebesar 68,97 persen atau mengalami peningkatan sebesar 4,57 persen dibanding tahun 2017.

**Gambar 26. Perkembangan Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Sanitasi Layak di Jawa Barat, 2014-2018**



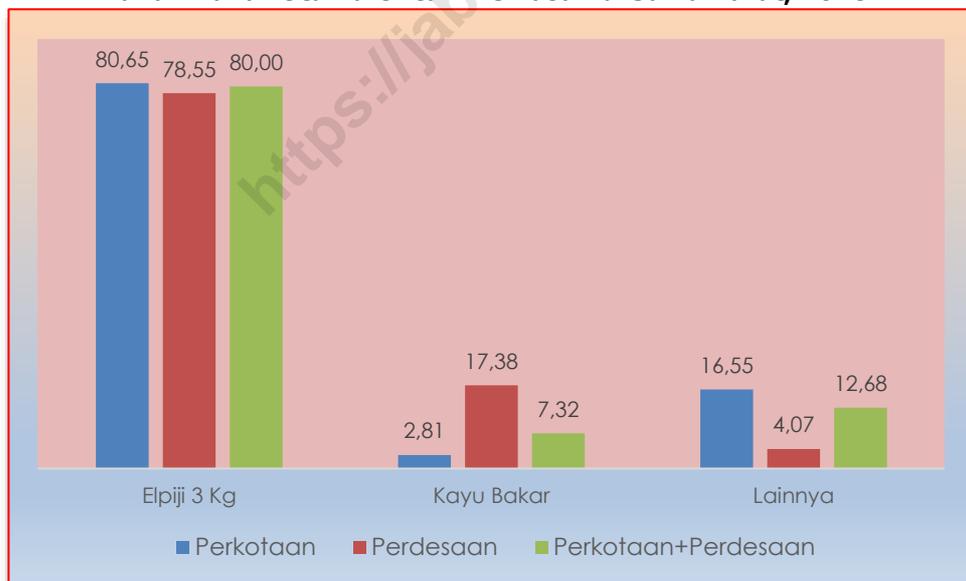
Sumber : Susenas 2014-2018, diolah

### 2.9.6. Bahan Bakar Utama Untuk Memasak

Secara umum bahan bakar untuk memasak dikelompokkan menjadi bahan bakar padat (kayu bakar, arang, dan lainnya) dan bahan bakar tidak padat (listrik, gas, dan minyak tanah). Isu penggunaan bahan bakar padat untuk memasak sedang hangat dibicarakan saat ini karena jenis bahan bakar ini dapat menyebabkan polusi udara serta dalam jangka panjang dapat menyebabkan menurunnya sumber daya hutan.

Penggunaan bahan bakar padat untuk keperluan memasak di Jawa Barat menurut hasil susenas masih cukup tinggi, yaitu sebesar 11,05 persen dengan distribusi lebih banyak di perdesaan (28,07 persen) dibanding di perkotaan (4,63 persen). Bila dilihat dari jenisnya, ada dua jenis bahan bakar yang paling banyak digunakan rumah tangga, yaitu gas (85,67 persen) dan kayu bakar (10,98 persen).

**Gambar 27. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Status Wilayah dan Bahan Bakar Utama Untuk Memasak di Jawa Barat, 2018**



Sumber : Susenas 2018, diolah

<https://jabar.bps.go.id>

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2018, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2018, Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik, 2016, Statistik Perumahan dan Permukiman, 2016, Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2018, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018, Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
- Kementrian Keuangan, 2015, Peranan APBN dalam mengatasi Backlog Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Jakarta: Kementrian Keuangan
- Republik Indonesia, 1992, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta: Sekretaris Negara

<https://jabar.bps.go.id>



# LAMPIRAN

<https://jabar.bps.go.id>

Tabel 1. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Jawa Barat, 2018

Kabupaten/Kota	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Lainnya	Total
Kab. Bogor	77.14	12.05	10.81	100.00
Kab. Sukabumi	84.32	4.75	10.93	100.00
Kab. Cianjur	84.66	4.33	11.01	100.00
Kab. Bandung	74.16	9.77	16.07	100.00
Kab. Garut	85.28	2.11	12.61	100.00
Kab. Tasikmalaya	87.12	1.79	11.09	100.00
Kab. Ciamis	91.44	2.52	6.03	100.00
Kab. Kuningan	85.58	2.61	11.80	100.00
Kab. Cirebon	72.01	3.01	24.98	100.00
Kab. Majalengka	82.65	1.74	15.61	100.00
Kab. Sumedang	84.31	5.65	10.04	100.00
Kab. Indramayu	79.34	2.13	18.53	100.00
Kab. Subang	89.57	4.47	5.97	100.00
Kab. Purwakarta	85.14	5.24	9.62	100.00
Kab. Karawang	81.51	8.34	10.16	100.00
Kab. Bekasi	75.66	18.55	5.79	100.00
Kab. Bandung Barat	85.45	4.45	10.10	100.00
Kab. Pangandaran	91.80	3.09	5.11	100.00
Kota Bogor	69.99	16.53	13.48	100.00
Kota Sukabumi	65.05	16.92	18.03	100.00
Kota Bandung	57.17	28.83	14.00	100.00
Kota Cirebon	62.60	11.42	25.98	100.00
Kota Bekasi	67.17	24.93	7.90	100.00
Kota Depok	69.36	23.67	6.97	100.00
Kota Cimahi	51.51	26.28	22.21	100.00
Kota Tasikmalaya	74.40	12.26	13.34	100.00
Kota Banjar	86.71	10.08	3.21	100.00
<b>Jawa Barat</b>	<b>77.71</b>	<b>10.50</b>	<b>11.79</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Susenas 2018, diolah

Tabel 2. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Jawa Barat, 2018

Kabupaten/Kota	SHM atas nama ART	SHM bukan atas nama ART dgn Perjanjian Tertulis	SHM Bukan Atas nama ART tanpa perjanjian tertulis	Sertifikat selain SHM	Surat Bukti Lainnya (girik/ letter C)	Tidak Punya	Total
Kab. Bogor	24.50	2.11	2.39	4.01	56.59	10.39	100.00
Kab. Sukabumi	20.89	1.91	3.54	3.23	50.34	20.09	100.00
Kab. Cianjur	16.59	1.61	2.87	1.39	54.51	23.02	100.00
Kab. Bandung	25.37	3.75	2.88	5.13	47.39	15.48	100.00
Kab. Garut	17.94	1.37	1.24	3.67	43.00	32.77	100.00
Kab. Tasikmalaya	18.72	0.68	2.66	2.40	67.77	7.77	100.00
Kab. Ciamis	19.84	2.03	1.06	2.42	43.76	30.90	100.00
Kab. Kuningan	27.19	2.29	2.85	0.93	26.55	40.18	100.00
Kab. Cirebon	37.09	2.99	4.83	2.98	39.24	12.86	100.00
Kab. Majalengka	27.27	3.48	2.59	3.85	41.75	21.06	100.00
Kab. Sumedang	35.62	2.75	5.51	5.42	35.73	14.97	100.00
Kab. Indramayu	26.72	2.10	2.56	7.54	44.68	16.40	100.00
Kab. Subang	34.24	2.64	3.51	1.12	50.73	7.77	100.00
Kab. Purwakarta	37.42	3.27	2.98	3.19	36.25	16.89	100.00
Kab. Karawang	54.98	5.51	8.01	0.26	20.84	10.39	100.00
Kab. Bekasi	60.34	3.87	6.11	3.67	17.38	8.64	100.00
Kab. Bandung Barat	16.58	1.08	1.60	5.84	48.29	26.61	100.00
Kab. Pangandaran	26.29	1.28	1.67	1.48	34.52	34.76	100.00
Kota Bogor	46.63	5.05	1.92	4.29	33.27	8.82	100.00
Kota Sukabumi	54.55	5.94	5.11	0.79	19.56	14.05	100.00
Kota Bandung	67.36	10.29	9.32	1.91	4.46	6.66	100.00
Kota Cirebon	61.86	5.61	8.70	0.71	10.70	12.42	100.00
Kota Bekasi	69.89	2.67	3.20	7.78	13.19	3.27	100.00
Kota Depok	65.16	7.34	6.01	2.51	16.35	2.63	100.00
Kota Cimahi	53.12	3.32	3.26	1.77	28.16	10.36	100.00
Kota Tasikmalaya	37.90	1.25	3.68	0.64	17.03	39.50	100.00
Kota Banjar	59.83	7.03	2.51	0.52	23.40	6.71	100.00
<b>Jawa Barat</b>	<b>35.63</b>	<b>3.16</b>	<b>3.72</b>	<b>3.45</b>	<b>38.40</b>	<b>15.63</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Susenas 2018, diolah

Tabel 3. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Luas Per Kapita di Jawa Barat, 2018

Kabupaten/Kota	Standar Kementerian Kesehatan (Luas minimal 8 m <sup>2</sup> /orang)	Standar WHO (Luas minimal 10 m <sup>2</sup> /orang)
Kab. Bogor	85.62	79.63
Kab. Sukabumi	88.76	83.04
Kab. Cianjur	88.35	82.67
Kab. Bandung	81.99	74.36
Kab. Garut	80.67	71.30
Kab. Tasikmalaya	85.31	75.65
Kab. Ciamis	91.88	87.76
Kab. Kuningan	93.05	89.96
Kab. Cirebon	91.38	88.28
Kab. Majalengka	95.54	92.09
Kab. Sumedang	86.87	78.77
Kab. Indramayu	93.46	89.39
Kab. Subang	92.24	86.92
Kab. Purwakarta	92.66	88.59
Kab. Karawang	90.12	84.11
Kab. Bekasi	88.85	84.92
Kab. Bandung Barat	89.74	82.01
Kab. Pangandaran	90.42	85.85
Kota Bogor	85.70	82.02
Kota Sukabumi	83.94	80.15
Kota Bandung	73.53	67.70
Kota Cirebon	86.93	82.15
Kota Bekasi	84.10	80.41
Kota Depok	87.46	83.42
Kota Cimahi	70.33	65.63
Kota Tasikmalaya	87.91	81.72
Kota Banjar	86.34	82.69
<b>Jawa Barat</b>	<b>86.79</b>	<b>81.22</b>

Sumber : Susenas 2018, diolah

Tabel 4. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Jenis Lantai Terluas di Jawa Barat, 2018

Kabupaten/Kota	Marmor/ Garnit/ Keramik	Parket/ Vinil/ Karpas	Ubin/Tegel/ Teraso	Kayu/Papan	Semen/Bata Merah	Bambu	Tanah	Lainnya
Kab. Bogor	79.63	0.00	8.69	0.48	9.38	0.54	1.09	0.18
Kab. Sukabumi	64.01	0.24	5.38	5.61	11.84	11.84	0.67	0.41
Kab. Cianjur	49.86	0.16	3.48	24.12	15.14	6.08	0.59	0.58
Kab. Bandung	68.35	0.00	4.70	12.01	13.65	1.28	0.00	0.00
Kab. Garut	55.22	0.19	6.97	23.44	9.02	4.03	0.87	0.26
Kab. Tasikmalaya	52.03	0.00	11.97	20.79	11.96	2.72	0.52	0.00
Kab. Ciamis	58.11	0.12	19.27	7.88	12.30	0.00	2.24	0.07
Kab. Kuningan	73.07	0.11	17.65	0.29	7.53	0.00	1.35	0.00
Kab. Cirebon	68.86	0.03	16.98	0.05	10.45	0.08	3.55	0.00
Kab. Majalengka	72.97	0.40	15.48	1.34	8.20	0.55	0.82	0.24
Kab. Sumedang	62.81	0.00	12.13	6.85	14.16	3.62	0.42	0.00
Kab. Indramayu	67.26	0.61	8.28	0.09	15.95	0.00	7.57	0.23
Kab. Subang	74.45	0.18	7.97	0.46	10.94	0.13	5.76	0.11
Kab. Purwakarta	77.72	0.07	6.88	6.80	6.45	1.30	0.78	0.00
Kab. Karawang	75.97	1.03	5.61	0.07	5.74	0.35	11.02	0.21
Kab. Bekasi	86.78	0.30	3.26	0.12	3.99	0.47	4.99	0.10
Kab. Bandung Barat	63.15	0.22	6.13	11.84	16.24	1.54	0.81	0.08
Kab. Pangandaran	72.21	0.26	10.42	4.07	8.54	0.00	4.50	0.00
Kota Bogor	86.63	0.12	7.73	0.20	4.93	0.15	0.23	0.00
Kota Sukabumi	78.39	0.75	5.22	0.48	14.07	0.85	0.24	0.00
Kota Bandung	83.21	0.75	7.35	1.24	6.85	0.00	0.61	0.00
Kota Cirebon	81.79	0.00	10.41	0.00	5.13	0.00	2.16	0.51
Kota Bekasi	94.81	0.09	2.76	0.00	2.22	0.00	0.12	0.00
Kota Depok	90.69	0.30	5.67	0.19	2.63	0.00	0.26	0.26
Kota Cimahi	80.67	0.28	7.85	0.97	10.23	0.00	0.00	0.00
Kota Tasikmalaya	70.56	0.39	13.50	0.97	13.29	0.49	0.79	0.00
Kota Banjar	62.09	0.89	12.26	0.00	23.50	0.00	1.25	0.00
Jawa Barat	72.91	0.24	7.96	5.55	9.47	1.64	2.09	0.14

Sumber : Susenas 2018, diolah

Tabel 5. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Jenis Atas Terluas di Jawa Barat, 2018

Kabupaten/Kota	Beton	Genteng	Asbes	Lainnya	Total
Kab. Bogor	3.47	71.03	24.65	0.85	100.00
Kab. Sukabumi	1.91	86.98	9.25	1.85	100.00
Kab. Cianjur	1.75	87.95	8.04	2.26	100.00
Kab. Bandung	3.44	93.10	3.42	0.04	100.00
Kab. Garut	2.68	90.28	6.33	0.70	100.00
Kab. Tasikmalaya	3.68	90.30	4.88	1.14	100.00
Kab. Ciamis	1.76	96.30	1.94	0.00	100.00
Kab. Kuningan	0.77	97.55	1.24	0.44	100.00
Kab. Cirebon	1.24	96.09	2.33	0.33	100.00
Kab. Majalengka	1.76	97.32	0.73	0.20	100.00
Kab. Sumedang	2.72	94.78	1.52	0.99	100.00
Kab. Indramayu	1.63	94.45	3.88	0.04	100.00
Kab. Subang	1.21	92.75	5.33	0.71	100.00
Kab. Purwakarta	1.82	92.46	5.05	0.68	100.00
Kab. Karawang	2.67	88.56	8.38	0.38	100.00
Kab. Bekasi	2.23	79.41	17.87	0.49	100.00
Kab. Bandung Barat	5.80	87.09	6.59	0.53	100.00
Kab. Pangandaran	3.32	75.94	17.78	2.96	100.00
Kota Bogor	2.36	66.40	28.31	2.94	100.00
Kota Sukabumi	2.19	79.65	17.07	1.09	100.00
Kota Bandung	6.99	76.05	15.27	1.68	100.00
Kota Cirebon	1.30	84.18	14.06	0.45	100.00
Kota Bekasi	3.65	58.50	37.32	0.53	100.00
Kota Depok	3.18	47.21	48.19	1.42	100.00
Kota Cimahi	8.89	74.91	15.25	0.95	100.00
Kota Tasikmalaya	7.23	89.12	3.65	0.00	100.00
Kota Banjar	1.62	92.38	5.88	0.12	100.00
<b>Jawa Barat</b>	<b>3.01</b>	<b>82.87</b>	<b>13.27</b>	<b>0.85</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Susenas 2018, diolah

Tabel 6. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Jenis Dinding Terluas di Jawa Barat, 2018

Kabupaten/Kota	Tembok	Anyaman	Lainnya	Total
Kab. Bogor	95.14	1.93	2.93	100.00
Kab. Sukabumi	73.82	14.82	11.35	100.00
Kab. Cianjur	62.58	28.61	8.82	100.00
Kab. Bandung	75.83	17.22	6.95	100.00
Kab. Garut	66.06	24.24	9.70	100.00
Kab. Tasikmalaya	66.13	25.18	8.69	100.00
Kab. Ciamis	74.14	21.12	4.73	100.00
Kab. Kuningan	95.89	2.67	1.44	100.00
Kab. Cirebon	96.60	2.15	1.25	100.00
Kab. Majalengka	93.19	3.55	3.27	100.00
Kab. Sumedang	80.73	10.63	8.64	100.00
Kab. Indramayu	92.74	4.00	3.26	100.00
Kab. Subang	86.78	5.82	7.40	100.00
Kab. Purwakarta	88.65	8.32	3.03	100.00
Kab. Karawang	83.39	8.22	8.39	100.00
Kab. Bekasi	92.67	1.74	5.58	100.00
Kab. Bandung Barat	81.32	9.64	9.04	100.00
Kab. Pangandaran	64.85	22.47	12.68	100.00
Kota Bogor	98.90	0.46	0.64	100.00
Kota Sukabumi	90.55	4.94	4.52	100.00
Kota Bandung	97.87	0.48	1.65	100.00
Kota Cirebon	97.63	0.44	1.93	100.00
Kota Bekasi	98.59	0.09	1.32	100.00
Kota Depok	98.70	0.00	1.30	100.00
Kota Cimahi	97.89	0.60	1.51	100.00
Kota Tasikmalaya	90.44	5.77	3.79	100.00
Kota Banjar	79.59	13.17	7.24	100.00
<b>Jawa Barat</b>	<b>85.96</b>	<b>8.76</b>	<b>5.28</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Susenas 2018, diolah

Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Sumber Air Minum di Jawa Barat Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Air Kemasan Bermerk	Air Isi Ulang	Leding	Sumur Bor/Pompa	Sumur Terlindung	Sumur tak terlindung	Mata air terlindung	Mata Air tak terlindung	Air permukaan	Air Hujan	Lain nya	Total
Kab. Bogor	12.14	15.56	4.84	18.79	34.64	5.19	5.37	3.00	0.48	0.00	0.00	100.00
Kab. Sukabumi	3.15	14.16	4.73	10.42	38.27	7.15	12.86	9.02	0.15	0.00	0.09	100.00
Kab. Cianjur	4.89	19.37	3.84	12.83	25.06	9.38	13.02	9.95	1.27	0.00	0.38	100.00
Kab. Bandung	7.52	51.44	3.56	9.90	15.93	1.07	9.81	0.78	0.00	0.00	0.00	100.00
Kab. Garut	3.99	16.85	6.60	8.58	31.95	6.08	14.30	10.49	0.89	0.00	0.25	100.00
Kab. Tasikmalaya	1.71	12.16	2.81	12.66	31.35	11.36	11.75	14.62	1.59	0.00	0.00	100.00
Kab. Ciamis	3.21	19.12	3.80	16.84	34.07	8.07	10.08	4.81	0.00	0.00	0.00	100.00
Kab. Kuningan	4.73	20.08	8.79	15.62	27.17	1.15	20.73	1.72	0.00	0.00	0.00	100.00
Kab. Cirebon	6.86	46.45	8.56	22.23	12.94	0.87	1.90	0.00	0.00	0.13	0.06	100.00
Kab. Majalengka	4.62	31.36	2.76	19.30	20.58	1.83	17.82	1.72	0.00	0.00	0.00	100.00
Kab. Sumedang	4.15	19.45	8.65	11.60	23.32	1.28	28.24	3.31	0.00	0.00	0.00	100.00
Kab. Indramayu	4.32	66.53	8.19	16.71	1.78	1.06	0.00	0.00	0.21	0.28	0.93	100.00
Kab. Subang	4.40	26.73	9.04	39.17	12.00	1.12	6.90	0.11	0.23	0.00	0.29	100.00
Kab. Purwakarta	13.52	17.67	6.99	15.08	18.73	15.96	7.72	4.33	0.00	0.00	0.00	100.00
Kab. Karawang	18.01	42.55	4.80	28.62	4.39	0.82	0.03	0.46	0.00	0.12	0.20	100.00
Kab. Bekasi	23.84	56.82	2.09	15.56	1.00	0.21	0.09	0.00	0.00	0.32	0.05	100.00
Kab. Bandung Barat	5.76	23.20	5.58	11.53	25.11	4.76	20.07	3.74	0.00	0.00	0.26	100.00
Kab. Pangandaran	7.90	31.02	0.31	9.41	31.06	8.79	5.57	5.02	0.71	0.19	0.00	100.00
Kota Bogor	13.16	25.12	30.35	18.80	9.03	0.15	2.96	0.28	0.00	0.00	0.15	100.00
Kota Sukabumi	14.96	33.28	7.20	27.09	16.00	0.69	0.41	0.00	0.00	0.00	0.38	100.00
Kota Bandung	28.43	45.40	11.48	10.27	2.40	0.29	1.37	0.00	0.00	0.00	0.36	100.00
Kota Cirebon	8.91	39.48	46.46	2.43	2.09	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	100.00
Kota Bekasi	35.76	39.41	1.32	22.33	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Kota Depok	26.58	20.87	2.46	43.99	5.91	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.13	100.00
Kota Cimahi	18.58	47.94	4.53	22.90	4.32	0.58	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Kota Tasikmalaya	7.67	37.71	5.07	13.02	30.76	5.62	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Kota Banjar	5.74	39.70	6.89	8.11	37.33	0.97	0.88	0.39	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>Jawa Barat</b>	<b>12.28</b>	<b>32.02</b>	<b>5.97</b>	<b>17.72</b>	<b>17.98</b>	<b>3.39</b>	<b>7.16</b>	<b>3.03</b>	<b>0.25</b>	<b>0.05</b>	<b>0.14</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Susenas 2018, diolah

Tabel 8. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Sumber Penerangan Utama di Jawa Barat Tahun 2018

Kabupaten/Kota	PLN dengan meteran	PLN tanpa meteran	Lainnya	Total
Kab. Bogor	93.64	6.36	0.00	100.00
Kab. Sukabumi	86.61	12.40	0.99	100.00
Kab. Cianjur	84.58	15.00	0.41	100.00
Kab. Bandung	88.40	11.60	0.00	100.00
Kab. Garut	81.52	18.18	0.31	100.00
Kab. Tasikmalaya	85.27	14.40	0.33	100.00
Kab. Ciamis	91.72	8.21	0.07	100.00
Kab. Kuningan	97.04	2.96	0.00	100.00
Kab. Cirebon	95.46	4.38	0.15	100.00
Kab. Majalengka	95.11	4.89	0.00	100.00
Kab. Sumedang	90.87	8.98	0.15	100.00
Kab. Indramayu	91.64	8.36	0.00	100.00
Kab. Subang	93.32	6.58	0.10	100.00
Kab. Purwakarta	96.09	3.91	0.00	100.00
Kab. Karawang	92.85	6.87	0.28	100.00
Kab. Bekasi	91.82	7.70	0.48	100.00
Kab. Bandung Barat	87.28	12.65	0.06	100.00
Kab. Pangandaran	90.86	9.14	0.00	100.00
Kota Bogor	95.26	4.48	0.25	100.00
Kota Sukabumi	90.37	9.63	0.00	100.00
Kota Bandung	90.85	9.15	0.00	100.00
Kota Cirebon	95.23	4.77	0.00	100.00
Kota Bekasi	99.38	0.62	0.00	100.00
Kota Depok	99.12	0.78	0.10	100.00
Kota Cimahi	89.44	10.56	0.00	100.00
Kota Tasikmalaya	94.08	5.92	0.00	100.00
Kota Banjar	90.81	9.19	0.00	100.00
<b>Jawa Barat</b>	<b>91.51</b>	<b>8.32</b>	<b>0.18</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Susenas 2018, diolah

Tabel 9. Persentase Rumah Tangga Dirinci Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Jawa Barat Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Sendiri	Bersama	Umum	Tdk ada Fasilitas/Ada tdk digunakan	Total
Kab. Bogor	82.39	6.59	3.39	7.63	100.00
Kab. Sukabumi	74.68	10.50	5.64	9.19	100.00
Kab. Cianjur	72.08	9.19	7.62	11.11	100.00
Kab. Bandung	78.02	13.72	5.28	2.99	100.00
Kab. Garut	71.41	10.60	11.22	6.77	100.00
Kab. Tasikmalaya	64.07	9.04	17.28	9.61	100.00
Kab. Ciamis	80.65	4.76	4.93	9.66	100.00
Kab. Kuningan	85.02	11.06	0.92	3.01	100.00
Kab. Cirebon	66.37	23.26	0.88	9.49	100.00
Kab. Majalengka	78.17	12.59	4.19	5.04	100.00
Kab. Sumedang	81.93	11.46	2.05	4.55	100.00
Kab. Indramayu	74.84	13.33	1.10	10.73	100.00
Kab. Subang	86.69	3.19	1.85	8.28	100.00
Kab. Purwakarta	87.91	5.99	1.21	4.89	100.00
Kab. Karawang	79.07	3.52	1.72	15.68	100.00
Kab. Bekasi	89.41	3.26	0.90	6.43	100.00
Kab. Bandung Barat	81.43	13.00	3.25	2.31	100.00
Kab. Pangandaran	83.74	3.26	2.07	10.92	100.00
Kota Bogor	90.82	6.42	1.05	1.71	100.00
Kota Sukabumi	81.84	11.75	4.07	2.34	100.00
Kota Bandung	78.98	17.65	3.22	0.16	100.00
Kota Cirebon	86.44	9.77	1.41	2.38	100.00
Kota Bekasi	97.49	2.12	0.22	0.17	100.00
Kota Depok	98.01	1.82	0.18	0.00	100.00
Kota Cimahi	73.14	23.14	3.73	0.00	100.00
Kota Tasikmalaya	84.27	6.44	6.44	2.85	100.00
Kota Banjar	87.36	2.92	2.96	6.76	100.00
<b>Jawa Barat</b>	<b>80.85</b>	<b>9.16</b>	<b>3.83</b>	<b>6.16</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Susenas 2018, diolah

Tabel 10. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar Dirinci Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Jawa Barat Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Tangki Septik	IPAL	Kolam/sawah/sungai	Lainnya	Total
Kab. Bogor	64.71	0.18	25.68	9.43	100.00
Kab. Sukabumi	43.92	1.68	19.94	34.46	100.00
Kab. Cianjur	44.30	0.50	38.82	16.38	100.00
Kab. Bandung	69.55	0.00	30.32	0.13	100.00
Kab. Garut	56.60	0.00	34.84	8.56	100.00
Kab. Tasikmalaya	46.16	0.00	37.13	16.71	100.00
Kab. Ciamis	69.25	0.00	19.77	10.98	100.00
Kab. Kuningan	84.00	0.00	14.76	1.24	100.00
Kab. Cirebon	91.80	0.01	7.89	0.30	100.00
Kab. Majalengka	82.07	0.07	17.86	0.00	100.00
Kab. Sumedang	85.64	0.58	7.17	6.61	100.00
Kab. Indramayu	95.80	0.22	3.37	0.61	100.00
Kab. Subang	80.94	0.19	5.47	13.40	100.00
Kab. Purwakarta	81.13	0.26	7.70	10.91	100.00
Kab. Karawang	89.63	0.00	6.85	3.52	100.00
Kab. Bekasi	91.06	0.45	4.78	3.71	100.00
Kab. Bandung Barat	46.65	0.75	12.10	40.50	100.00
Kab. Pangandaran	80.03	0.00	7.31	12.66	100.00
Kota Bogor	67.44	2.09	21.35	9.12	100.00
Kota Sukabumi	44.39	0.21	53.74	1.66	100.00
Kota Bandung	45.09	9.05	45.18	0.68	100.00
Kota Cirebon	84.70	6.55	6.90	1.85	100.00
Kota Bekasi	94.26	0.01	1.91	3.82	100.00
Kota Depok	96.63	0.29	2.10	0.98	100.00
Kota Cimahi	61.29	0.95	37.69	0.07	100.00
Kota Tasikmalaya	54.02	0.00	44.88	1.10	100.00
Kota Banjar	92.58	0.00	7.03	0.39	100.00
<b>Jawa Barat</b>	<b>72.00</b>	<b>0.87</b>	<b>18.96</b>	<b>8.17</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Susenas 2018, diolah

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. PHH Mustofa No.43 Bandung 40124, Jawa Barat  
Telp: 022 7272595, 7201696 Fax: 022 7213572  
Email: bps3200@bps.go.id  
Website: <http://jabar.bps.go.id>

ISBN 978-602-5745-28-7

